ISLAMISASI TEORI KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM MODERN

Sabila Rosyida

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia

E-mail: sabilarosyida95@gmail.com

A'yun Nadhira

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia

E-mail: ayunnadhira@gontor.ac.id

Abstract: Materialism and consumerism influence people's consumption behavior, considering that the purpose of consumption is not only to fulfill life's needs, but also for mere satisfaction. The purpose of this study is to examine the importance of Islamization of economics, especially the theory of consumption, referring to theory of Islamization of science of al-Attas and al-Faruqi. The results of this study indicate that the Islamization of economics in consumption theory is very important to liberate society from the secular doctrine of materialism; Islamizing the goods and services concept by limiting it with the term of *ḥalāl* *ṭayyib*; incorporating the element of *maṣlaḥah* as the main foundation in consumption instead of satisfaction. With the Islamization of economics on consumption theory, it is hoped that it can provide a change and enlightenment, particularly in the consumption behavior of the Muslim community, and generally for economy development.

Keywords: Islamization; modernization; consumption; *maṣlaḥah*.

Pendahuluan

Modernisasi menurut definisi historis adalah sama dengan westernisasi.¹ Modernisasi ada karena masuknya budaya dan *world-*

¹ Elly Rosana, "Modernisasi dan Perubahan Sosial", *Jurnal Tapis*, Vol. 7, No. 12 (2011), 33.

view Barat, yang hal ini disebabkan karena adanya proses sekularisasi. Pengaruh sekularisasi menghasilkan dampak yang sangat luas kepada sistem kebudayaan yang ada pada masyarakat Muslim, dan mempengaruhi pola dan gaya hidup mereka serta berujung kepada perubahan perilaku masyarakat setempat.²

Selain itu, kebanyakan dari perilaku konsumsi masyarakat Muslim tidak lagi berdasarkan kepada dimensi spiritual, tetapi sudah beralih kepada konsep kapitalis yang mendasarkan segala sesuatunya kepada ukuran yang materialistik. Kondisi ini terlihat pada fenomena yang terjadi pada masyarakat, di mana mereka terperangkap pada pemakaian kartu kredit yang berlebihan akibat dorongan dari keinginan dan kesenangan semata, sehingga terjadi peningkatan hutang yang luar biasa dikarenakan adanya mekanisme bunga (*interest rate*) yang menjalar bersama sistem hutang tersebut.³ Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari Barat yang kapitalis melalui ideologi hedonisme dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan materi semata. Ketika manusia tanpa sadar telah berasaskan pada perilaku hedonis, maka sebisa mungkin mereka akan mempertahankan gengsinya untuk tetap mengikuti gaya hidup mewah sesuai dengan keinginan dan kepuasan mereka, pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya hal-hal patologis dalam ekonomi, seperti hutang dan menghalalkan segala transaksi jual-beli walaupun tidak sesuai dengan etika dan moral. Hedonisme dalam pengertian ini akan mengancam dan merusak masa depan umat manusia dan lingkungannya.⁴

Teori perilaku konsumen yang dikembangkan oleh Barat merupakan sumber dualitas antara “rasionalisme ekonomi” dan “utilitarianisme”. Dalam teori ini sangat mempertimbangkan tujuan para konsumen yang bersifat *homo-economicus*, yaitu mendapatkan kepuasan dengan memandang bahwa uang adalah segalanya dan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepuasan tersebut⁵. Sedangkan dalam Islam, segala teori aspek kehidupan yang ada di dunia

² Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1978), 119.

³ Nurnasrina, “Ekonomi Islam: Sarana dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Madani”, *Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (November 2013), 222.

⁴ Sri Sudarsih, *Konsep Hedonisme Epikuros dan Situasi Indonesia Masa Kini*, (Semarang: UNDIP, 2007), 1.

⁵ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 154.

harus berdasarkan pada konsep ketuhanan di mana Tuhan memegang peran yang sangat penting di atas segala sesuatu. Dalam hal ini, konsep tauhid dan rujukannya (al-Qur'an dan Sunnah) menjadi unsur yang sangat penting dalam Islamisasi ilmu ekonomi, karena semua hal yang berkaitan dengan teori ilmu ekonomi haruslah berasaskan kepada konsep Tauhid. Jika melenceng dari konsep tauhid, maka teori itu tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, terlihat bahwa rasionalitas ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi keinginan dengan capaian materialistis dan *utilitarianism* berfokus kepada kekuatan *maximum individual* yang bersifat subjektif. Dualitas yang memprakarsai timbulnya perilaku konsumsi ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, yaitu munculnya sifat materialisme dan egoisme dengan mementingkan kepentingan pribadi serta *acuh tak acuh* terhadap realitas sosial. Selain itu, yang menjadi permasalahan di sini adalah prioritas konsumsi yang lebih condong pada kepuasan di mana kebutuhan dinilai sama dengan keinginan dan keinginan akan ditentukan oleh tingkat kepuasan yang ingin dicapai. Jika semua individu hanya fokus kepada kepuasan konsumsi maka hanya segelintir orang yang dapat memenuhi kepuasan maksimumnya. Perilaku konsumsi yang demikian akan menimbulkan kesenjangan sosial, dan tidak dapat menjawab problem ekonomi seperti kemiskinan karena menafikan norma sosial dalam perilaku konsumsi.

Beberapa penelitian terkait dengan Islamisasi ilmu ekonomi adalah penelitian yang dilakukan oleh Beik, Dayno, Qosim, dan Mustofa. Beik, dalam proses Islamisasi ilmu ekonomi, mengembangkan alat ukur kesejahteraan dan kemiskinan dengan menjadikan shari'ah sebagai dasarnya, yakni alat ukur CIBEST yang tidak sekedar mengukur kesejahteraan dan kemiskinan melalui pendekatan material saja, melainkan juga melalui pendekatan spiritual.⁶ Dayno, melakukan penelitian tentang Islamisasi terhadap *counter accounting* dengan mengambil hikmah dari sebuah prinsip dengan merujuk kepada tafsir Ibn Kathir.⁷ Qosim berpendapat bahwa Islamisasi ilmu ekonomi itu sangat penting dan mendesak

⁶ Irfan Syauqi Beik, "Islamisasi Ilmu Ekonomi", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 (2016), 184-208.

⁷ Dayno Utama, "Islamisasi Prinsip Counter Accounting", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 2 (2017), 477-498.

untuk mengarahkan manusia kepada tujuan yang benar dalam hidupnya melalui *worldview* Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan akhirat.⁸ Dalam studi yang dilakukan oleh Mustofa, diekankan bahwa Islamisasi dimulai dari pengkajian disiplin yang dijadikan objek, dengan mengelaborasi secara mendalam atas *worldview* Islam, filsafat dan nilai-nilai dasar dari disiplin tersebut, dan kemudian mengeliminasi poin-poin yang tidak sejalan dengan Islam dan mengasimilasi yang selaras dengannya.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, ide dan gagasan munculnya Islamisasi ilmu masih belum dijelaskan dengan baik. Padahal ide dan gagasan dari Islamisasi ilmu sangat penting untuk dikaji sebelum melakukan Islamisasi terhadap suatu konsep atau teori. Islamisasi ilmu diperlukan untuk membebaskan masyarakat dari doktrin sekuler serta berbagai faham yang lahir dari doktrin tersebut. Tulisan ini akan membahas tentang Islamisasi teori konsumsi dengan menggunakan pendekatan proses Islamisasi yang ditawarkan oleh al-Attas. Ide dan gagasan Islamisasi akan dikaji secara singkat dan jelas berdasarkan dua pelopor utamanya yaitu al-Attas dan al-Faruqi. Pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada urgensi Islamisasi ilmu ekonomi khususnya teori konsumsi dan mengkaji tawaran Islamisasi teori konsumsi yang sesuai dengan konsep Islamisasi al-Attas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Peneliti melakukan penelusuran buku *Islam and Secularism* dan *prolegomena* yang ditulis oleh al-Attas dan *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan* dan *al-Tawhīd* yang ditulis oleh Ismail Raji al-Faruqi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Konsep Islamisasi Ilmu

Dua tokoh utama pelopor Islamisasi ilmu pengetahuan adalah Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Isma'il Raji al-Faruqi. Konsep Islamisasi pertama kali diusung oleh al-Attas pada tahun 1960

⁸ Nanang Qosim, "Menjajaki Potensi Islamisasi Ilmu Ekonomi", *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2 (2016), 250-263.

⁹ Imron Mustofa, "Islamisasi Ilmu Ekonomi 'Tambal Sulam' Wacana Ilmiah", *Kontemplasi*, Vol. 5, No. 1, (2017), 133-159.

an, kemudian disusul dengan al-Faruqi pada tahun 1980an.¹⁰ Selain kedua tokoh tersebut, beberapa cendekiawan juga ikut berperan penting dalam pengembangan isu Islamisasi ilmu ini, baik melalui respon, kritik maupun diskusi tentang Islamisasi yang banyak ditulis dalam artikel dan jurnal.

Islamisasi ilmu menurut al-Attas adalah pembebasan akal pikiran manusia dari segala hal yang berbau magis atau sihir, mitologi, animisme, tradisi dan kultur nasional serta sekuler yang mampu mengontrol segala pikiran manusia dan bahasa manusia. Al-Attas menegaskan bahwa pemikiran, bahasa, dan perilaku umat Muslim tidak boleh dikontrol oleh tradisi sekuler ataupun hal-hal yang berbau Barat lainnya.¹¹ Menurut al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan dengan menghasilkan buku pegangan atau buku dasar di perguruan tinggi, dengan menuangkan kembali disiplin-disiplin ilmu modern dalam wawasan Islam, setelah sebelumnya mengkritisi kedua sistem ilmu pengetahuan Islam dan Barat.¹² Dalam hal ini, al-Faruqi tidak langsung membuang nilai-nilai Barat yang ada di dalam ilmu pengetahuan tersebut, melainkan membuang jika tidak sesuai dengan nilai dan *worldview* Islam, menata, menganalisa dan menafsirkan ulang dan menyesuaikan ilmu Barat, yang mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai dan *worldview* Islam.¹³

Apabila diperhatikan dengan seksama yang terjadi saat ini, banyak sekali sistem pendidikan Barat modern yang membuat umat Muslim condong ke arah sekuler, yang menyebabkan mereka masih terbelenggu dan tidak bebas dari segala pengaruh negatif sihir, mitologi, animisme dan sekularisme. Al-Attas memikirkan konsep bagaimana caranya untuk membebaskan manusia dari unsur-unsur sekularisme yang muncul di dalam ilmu pengetahuan Barat kontemporer tersebut. Karena sejatinya, proses Islamisasi ilmu tidak dapat dilaksanakan sebelum membebaskan pikiran dan jiwa dari segala hal yang berbau sekularisme tersebut¹⁴. Menurut al-Faruqi, semua disiplin ilmu pengetahuan seperti humaniora, ilmu-

¹⁰ Muhammad Aslam Haneef, *A Critical Survey of Islamization of Knowledge* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2014), 17.

¹¹ Al-Attas, *Islam and Secularism*, 119.

¹² Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan* (Kuala Lumpur: IIIT, 1997), 15.

¹³ Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan* (Bandung: Pustaka, 1995), 35.

¹⁴ Al-Attas, *Islam and Secularism*, 15.

ilmu sosial dan ilmu alam harus dipertimbangkan dan dibangun kembali, agar semua cabang ilmu pengetahuan tersebut dibasiskan kembali kepada Islam. Semua disiplin ilmu itu harus disusun kembali agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologi, strategi, dan segala yang termasuk data, masalah, tujuan dan aspirasi dari segala cabang ilmu.¹⁵

Segala cabang ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam paradigma sekularisme akan membawa dampak kegagalan pada manusia dan tidak sesuai bagi umat Islam,¹⁶ karena visi Islam akan dihilangkan dan digantikan visi asing yang dianggap universal dan relevan bagi setiap orang.¹⁷ Al-Attas juga memperingatkan seluruh umat Islam bahwa mereka telah gagal dalam memahami fenomena yang terjadi, yaitu mereka menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan adalah netral, bersifat universal dan berlaku di manapun dan kapanpun. Menurut al-Attas, hal ini justru menciptakan banyak masalah dan akan berujung pada kerusakan *worldview* Islam dan norma-norma yang ada di dalamnya. Hal itu disebabkan karena terjadinya asimilasi atau perbauran antara dua kebudayaan yang berbeda, yaitu antara kebudayaan Islam dan Barat atau Sekuler, sehingga ciri khas kebudayaan Islam yang asli hilang dan menyebabkan krisis agama, sosial dan ekonomi. Pengaruhnya tidak hanya merasuki aspek kehidupan Barat, namun juga telah menyebar pada pemikiran Muslim di mana-mana.¹⁸

Al-Attas memasukkan makna keadilan dan pengenalan dalam penggunaan ilmu pengetahuan, sebab dalam makna keadilan, ilmu pengetahuan harus diletakkan pada tempatnya; ilmu pengetahuan bukan dipergunakan untuk suatu hal yang berbau kejahatan. Hal tersebut berarti seseorang yang berilmu harus mampu mengenali dan mengakui fenomena yang ada berdasarkan pada kebenaran dan kepastiannya. Dalam makna pengenalan, manusia harus mengenali dirinya sendiri, harus mampu memahami dirinya sendiri. Jika seorang manusia sudah gagal untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri maka ia gagal dalam mengenal dan memahami

¹⁵ Al-Faruqi, *Islamization of Knowledge*, 9.

¹⁶ Hadi Sharifi, "Review of Islamization of Knowledge by Ismail Raji Al-Faruqi," *Muslim Education Quarterly*, Vol. 1, No. 3 (1984), 88-94.

¹⁷ Al-Faruqi, *Islamization of Knowledge*, ix.

¹⁸ Wan Mohd. Nor Wan Daud, *The Beacon on the Crest of a Hill-A Brief History and Philosophy of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, (Kuala Lumpur: ISTAC Malaysia, 1991), 31.

Tuhannya. Maka jika ada seseorang yang salah paham terhadap Tuhannya, akhirnya ia akan salah dalam menempatkan Tuhannya dan salah pula dalam menempatkan dirinya dan ilmu pengetahuan yang ia miliki.¹⁹

Al-Attas merumuskan tujuan pendidikan dalam Islam yaitu mewujudkan manusia yang baik dan universal (*al-insān al-kāmil*), yaitu adalah manusia yang mempunyai kriteria: pertama, manusia yang seimbang, yaitu memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian; dimensi esoterik vertikal yang mana ia selalu tunduk dan taat kepada Allah dan dimensi eksoterik, dialektikal, horisontal, yang mana membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosial alamnya. Kedua, manusia yang seimbang dalam kualitas pikir, zikir, dan amalnya.²⁰ Tujuan ini tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya suatu upaya yang maksimal dalam merumuskan sistem pendidikan Islam yang terpadu.

Al-Faruqi menjelaskan prinsip ilmu pengetahuan dalam tiga prinsip: pertama, penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas; maksudnya meniadakan segala hal yang berbau kebohongan dan penipuan dalam Islam. Dalam prinsip ini, seorang Muslim dapat didefinisikan sebagai orang yang tidak menyatakan apa-apa kecuali sesuatu yang benar sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Maka segala sesuatu yang melenceng dari prinsip tersebut, seperti mengatakan kebohongan, melakukan penipuan, kecurangan, dan sejenisnya merupakan hal-hal yang dibenci oleh Islam. Kedua, penolakan kontradiksi-kontradiksi hakiki; melindungi dari kontradiksi di satu pihak, dan dari paradoks di lain pihak. Prinsip ini merupakan esensi dari rasionalisme. Tanpa hal ini tidak akan bisa lepas dari skeptisisme; karena suatu kontradiksi yang hakiki mengandung arti bahwa kebenaran dari masing-masing unsur kontradiksi tidak akan pernah diketahui. Ketiga, keterbukaan bagi bukti baru dan/atau yang bertentangan. Prinsip ini melindungi kaum Muslimin dari literalisme, fanatisme, dan konservatisme yang mengakibatkan kemande-

¹⁹ Al-Attas, *Islam and Secularism*, 73.

²⁰ Muhaimin, *Konsepsi Pendidikan Islam: Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum* (Solo: Ramadhani, t.th.), 72-73.

gan dan mendorong kaum Muslimin bersifat rendah hati secara intelektual.²¹

Menurut al-Attas, proses Islamisasi ilmu dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama, mengisolir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang terbentuk oleh budaya dan peradaban Barat, dari setiap bidang ilmu pengetahuan modern saat ini, khususnya dalam ilmu pengetahuan humaniora. Namun, ilmu-ilmu alam, fisika dan terapan harus diislamkan juga khususnya dalam penafsiran-penafsiran akan fakta-fakta dan dalam formulasi teori-teori. Kedua, memasukan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci Islam kedalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Konsep-konsep dasar Islam itu di antaranya adalah konsep *din*, manusia (*insān*), ilmu (*‘ilm wa al-ma‘rifah*), keadilan (*‘adl*), amal yang benar (*‘amal* sebagai *adab*) dan semua istilah dan konsep yang berhubungan dengan itu semua, dan konsep tentang universitas (*kulliyah, jami‘ah*) yang berfungsi sebagai bentuk implementasi semua konsep-konsep itu dan menjadi model sistem pendidikan.²²

Selain itu, proses Islamisasi ilmu menurut al-Faruqi adalah dengan lima proses, yaitu: *Pertama*, mengartikulasikan paradigma keilmuan Islam dengan membangun epistemologi Islam yang berdasarkan kepada transformasi teologi ke dalam *framework* konseptual, dan mengelaborasi paradigma keilmuan yang telah digunakan sepanjang sejarah pemikiran Islam dengan tetap merujuk kepada Islam. *Kedua*, mengembangkan metodologi al-Qur’ān dengan menyusun tema-tema dalam al-Qur’ān sesuai dengan ilmu-ilmu sosial dan alam. *Ketiga*, mengembangkan metodologi dengan memahami Sunnah dan mengaitkannya dengan konteks kekinian. *Keempat*, menguji kembali khazanah intelektual Islam, karena menurutnya khazanah intelektual Islam perlu diseleksi kembali untuk dipilih mana yang diterima dan mana yang ditolak. Kelima, mengkaji khazanah intelektual Barat, untuk dapat mengkritik epistemologi Barat, Muslim perlu untuk memahami Barat terlebih dahulu, karena tanpa kritik terhadap epistemologi

²¹ Isma’il Raji al-Faruqi, *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life* (Herndon, Virginia, U.S.A: IIT, 1992), 45-46.

²² Al-Attas, *Prolegomena* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), 144.

Barat, maka Muslim tidak dapat melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan secara sempurna.²³

Al-Faruqi menekankan bahwa sistem Islamisasi harus diresapi dengan semangat keislaman yang tinggi. Harus menciptakan visi dan semangat Islam, dan harus tetap setia kepada tujuan ideologis Islam. Segala sistem yang ada tidak diperbolehkan meniru sistem Barat, meskipun hanya untuk menoleransi kebutuhan ekonomi, kebutuhan pragmatis dari pelajar untuk pengetahuan profesional, kemajuan pribadi, atau keuntungan materi, karena sistem harus disertai dengan visi Islam.²⁴

Metodologi Ekonomi Islam

Metodologi ilmu ekonomi merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam proses Islamisasi ilmu ekonomi, dikarenakan melalui metodologi ilmu inilah kebenaran hukum atau teori diharapkan dapat tercapai. Perumusan teori-teori ataupun sistem untuk mendukung ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan *worldview* Islam.²⁵ Sementara itu, teori dan sistem yang dilandaskan pada *worldview* Islam semestinya berangkat dari sebuah metodologi yang berbeda dengan metodologi ilmu ekonomi kapitalis. Adanya Islamisasi ilmu bertujuan untuk memberikan landasan metodologis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan visi Islam, yakni dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam, wahyu Islam atau *maqāsid shari'ah* ke dalam konstruksi ilmu ekonomi.

Metodologi dalam ilmu ekonomi memuat seperangkat kriteria, aturan dan prosedur yang digunakan untuk menguji sifat, ruang lingkup dan kinerja ilmu ekonomi.²⁶ Zubair Hassan mengkategorikan dua pendekatan metodologi yang selama ini sering digunakan dalam membangun ilmu ekonomi Islam. Yaitu *all-or-nothing approach* dan *step by step approach*.²⁷ Beik menjelaskan bahwa *all or nothing*

²³ Ibrahim A Ragab, "On The Nature and Scope of the Islamization Process: Towards Conceptual Clarification", dalam *Intellectual Discourse: Internation Islamic University Malaysia*, Vol. 3, No. 2 (1995), 113-122.

²⁴ Al-Faruqi, *Islamization of Knowledge*, 9.

²⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 5.

²⁶ Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi* (Malang: BPFE, 2007), 245.

²⁷ Zubair Hassan, "Islamization of Knowledge: Issue And Agenda", *IIUM Journal of Economics and Management*, Vol. 6, No. 2 (1998), 32.

approach merupakan sebuah pendekatan yang berpegang pada prinsip penggunaan shari'ah secara total atau tidak sama sekali, dalam hal ini dengan tegas teori ekonomi konvensional ditolak dan diruntuhkan, untuk selanjutnya dibangun ilmu ekonomi Islam. Namun, banyak yang menganggap bahwa pendekatan pertama ini kurang aplikatif. Sedangkan pendekatan kedua adalah *step by step* atau tahap demi tahap. Jika menggunakan pendekatan kedua, maka ilmu ekonomi Islam sering dianggap meniru ilmu ekonomi konvensional, karena pendekatan ini hanya menyaring komponen-komponen ilmu ekonomi konvensional yang bertentangan dengan ajaran Islam,²⁸ sehingga mengakibatkan munculnya banyak pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi konvensional minus riba plus zakat dan bagi hasil.²⁹

Beik berpendapat bahwa pilihan yang paling rasional dan aplikatif untuk saat ini adalah dengan melakukan Islamisasi ilmu ekonomi melalui pendekatan yang bersifat integratif. Pendekatan ini adalah pendekatan dengan menjadikan ilmu ekonomi konvensional sebagai *benchmark*, kemudian dilakukan modifikasi dan insersi dari nilai-nilai Islam sehingga dapat melahirkan ilmu ekonomi Islam yang berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional.³⁰

Salah satu tokoh yang pernah menawarkan pemikirannya terkait metodologi Islam adalah Ismail Raji al-Faruqi dengan prinsip dasar "*the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and the unity of knowledge, the unity of life and the unity of humanity*".³¹ Jika menelaah kembali apa yang telah ditawarkan oleh al-Faruqi, maka akan nampak bahwa metodologi ini jauh berbeda dibandingkan dengan *scientific approach* yang berbasis pada sesuatu yang empiris, yang secara tidak langsung pendekatan ini menafikan eksistensi Tuhan. Hal ini dikarenakan pendekatan ini menilai bahwa sebuah kebenaran harus diperoleh dengan *a posteriori*. Safi mencatat bahwa metodologi Barat memiliki dua kelemahan yaitu, *pertama*, terjebak kepada bias-bias empirisme yang mencapai puncaknya dalam pendekatan positivisme logis. *Kedua*, pencabutan wahyu ilahi

²⁸ Beik, "Islamisasi Ilmu Ekonomi", 185-186.

²⁹ Ibid., 186.

³⁰ Ibid., 186.

³¹ Al-Faruqi, *Islamization of Knowledge*, 22-23.

sebagai sumber pengetahuan ilmiah.³² Akibatnya kebenaran ilmiah hanya dapat dibuktikan secara empiris dan logis atau bahkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Sementara itu, menurut Hatoero metodologi tradisional Islam juga mengandung kelemahan yaitu membatasi ijtihad kepada penjelasan legalistik formal, terlalu atomistik dan terpaku kepada pemikiran analogis.³³

Merujuk kepada al-Attas, Daud menjelaskan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer adalah lebih dari sebuah metode dari pada proses dan konsep. Dengan kata lain, Islamisasi pengetahuan kontemporer adalah metode menafsirkan fakta dan menciptakan serta menghasilkan baik makna individu maupun sosial di luar dari metafisika Islam, dan tidak dengan hanya mencangkok atau mentransplantasikan ilmu Islam dan prinsip Islam ke dalam badan ilmu pengetahuan kontemporer atau sains yang hanya akan menuai hasil yang bertentangan dan kebingungan intelektual.³⁴ Adapun kaitannya dengan Islamisasi ilmu, terdapat dua jenis ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh cendekiawan Muslim modern, yaitu: *Pertama, substantive knowledge*, yaitu menguasai ilmu pengetahuan modern, menguasai warisan intelektual Islam, antologi, analisis, konseptualisasi, dan teorisasi ilmu ekonomi Islam. Kedua, *technical knowledge*, berupa taksiran kritis terhadap ilmu pengetahuan modern, taksiran kritis terhadap warisan intelektual Islam dan analisis kreatif serta perpaduannya.³⁵

Teori Konsumsi Konvensional

Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di Barat setelah timbulnya kapitalisme merupakan sumber dari dualitas, yakni “rasionalisme ekonomi” dan “utilitarianism”.³⁶ Dari sumber rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme inilah kemudian timbul perilaku konsumen. Rasionalisme ekonomi mengandung pengertian bahwa setiap konsumen akan mengonsumsi barang sesuai dengan sifatnya sebagai *homo economicus*. Secara lebih spesifik,

³² Louay M. Safi, *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Method of Inquiry* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 1996), 19-20.

³³ Arief Hatoero, *Ekonomi Islam*, 250.

³⁴ Wan Mohd Nor Wan Daud, *The Bacon of The Crest of Hill-A Brief History and Philosophy of International Institute of Islamic Thought and Civilization* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1991), 37.

³⁵ Haneef, *A Critical Survey*, 32.

³⁶ Max Weber, *The protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Charles Scribners' Sons, 1958), 76.

konsumen akan bertindak untuk memenuhi kepentingannya sendiri, dan perhitungan dari setiap perilaku ekonomi untuk mencapai sukses senantiasa diukur berdasarkan capaian yang bersifat materialistik.³⁷ Teori ini mempertimbangkan maksimalisasi pemanfaatan sebagai tujuan konsumen yang dipostulasikan. Pemanfaatan yang dimaksimalkan adalah pemanfaatan “*homo-economicus*” yang tujuan tunggalnya adalah mendapatkan kepuasan. Dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna atau *utility*. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah nilai gunanya atau *utility*-nya.³⁸ Ekonomi pada tingkatan tertinggi dan dorongan satu-satunya adalah “kesadaran akan uang”.³⁹

Teori ini terlahir dari teori utilitarianisme yang seringkali disebut utilitarianisme-hedonis, yang berarti suatu pandangan yang mengukur benar atau salah berdasarkan kriteria kesenangan atau kesusahan; sesuatu dianggap baik dan benar jika memberikan kesenangan dan sebaliknya. Dengan dua nilai dasar yaitu rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme, perilaku konsumsi seseorang akan bersifat individualis, diwujudkan dalam bentuk segala barang dan jasa yang dapat memberikan kesenangan dan kenikmatan. Individu yang rasional akan melakukan pilihan terhadap barang-barang dan jasa yang dikonsumsi yang dapat memberikan manfaat, kegunaan, dan kekuasaan yang paling tinggi. Konsumen pun akhirnya bertindak rasional yang berarti konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan yang maksimum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁴⁰

Konsep barang atau jasa dalam ekonomi konvensional adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai guna yang dapat memberikan tingkat kepuasan kepada seseorang. Sementara konsep utilitas yang dimaksud adalah jika sesuatu tersebut dapat memberikan tingkat kepuasan sehingga dinamakan barang konsumsi. Pandangan *utility* ini sangat bersifat subyektif bagi masing-masing individu, dalam

³⁷ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Islami* (Yogyakarta: EKONESIA, 2003), 120.

³⁸ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 154.

³⁹ Kahf, *Ekonomi Islam*, 17.

⁴⁰ Endang Setyowati et al., *Ekonomi Mikro: Pengantar* (Yogyakarta: FTIE YKPN, 2003), 89.

artian sesuatu yang dianggap memberikan nilai guna berupa pemenuhan rasa puas atas konsumsinya belum tentu akan memberi rasa puas pada individu yang lain.⁴¹ Dalam kerangka konvensional, kebutuhan selalu senilai dengan keinginan, di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Teori ekonomi konvensional menjabarkan kepuasan (utilitas) seperti memiliki barang/jasa untuk memuaskan keinginan manusia.⁴² Pada dasarnya, satu jenis benda ekonomi merupakan substitusi sempurna bagi benda ekonomi lainnya sepanjang memberikan utilitas yang sama (*indifference curve*). Akibatnya, anggaran akan dialokasikan untuk mengkonsumsi apa saja sepanjang utilitasnya maksimum. Tidak ada benda ekonomi yang berharga dari pada benda ekonomi lainnya, yang membedakan adalah tingkat kepuasan diperoleh akibat mengkonsumsi benda tersebut. Karenanya, benda yang memberikan utilitas lebih tinggi akan menjadi lebih berharga dibandingkan yang memberikan utilitas lebih rendah.⁴³

Tujuan terakhir dari konsumsi individu adalah untuk mencapai tujuan *maximum satisfaction* (kepuasan maksimum) atau *maximum utility*, di mana konsumen akan membelanjakan sejumlah pendapatan mereka demi mencapai kepuasan maksimum. Keinginan manusia selalu didorong untuk dipenuhi, keinginan yang senantiasa ingin dipenuhi ini terkadang tidak didasarkan pada kebutuhan, sehingga pengeluaran konsumsi tidak serta merta dapat dikontrol dengan baik. Akibatnya, masyarakat hanya akan mementingkan kepuasan individual dan acuh tak acuh terhadap realitas sosial.

Teori Konsumsi Islam

Islam menawarkan konsep *maṣlaḥah* terkait dengan perilaku konsumsi, dan sifat *moderity* (di tengah-tengah) berdasarkan etika konsumsi Islam. Jika ditelaah lebih jauh, maka konsep *wants* (keinginan) dan *needs* (kebutuhan) berasal dari tempat yang sama, yaitu naluri hasrat manusia. Namun, dalam kerangka Islami, seluruh hasrat manusia tidak bisa dijadikan sebagai *needs*. Hanya hasrat yang memiliki *maṣlaḥah* atau manfaat di dunia dan akhirat yang bisa dijadikan sebagai *needs*. Maka, seluruh aktivitas ekonomi

⁴¹ Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan pada Teori Ekonomi Islam* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2008), 146-147.

⁴² Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2005), 152.

⁴³ Anto, *Pengantar Ekonomika Islami*, 128-129.

yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Dengan demikian konsep *wants* adalah konsep yang bebas nilai, sedangkan konsep *needs* adalah konsep yang tidak bebas nilai. Dalam hal ini, Islam tidak memberikan dorongan kepada manusia untuk mengikuti keinginannya, tetapi sebaliknya, mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang didefinisikan dalam shari'ah⁴⁴

Menurut konsep Islam, kebutuhan ditentukan oleh *maṣlahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqāṣid al-shari'ah*.⁴⁵ Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki *maṣlahah* akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.⁴⁶ Menurut Shāṭibī, *maṣlahah* adalah kepemilikan atau kekuatan barang/jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini. Shāṭibī membedakan *maṣlahah* menjadi tiga, yaitu *ḍarūrīyah* (kebutuhan), *hājjiyah* (pelengkap), dan *taḥsiniyah* (perbaikan).⁴⁷ Khallāf menjelaskan, *ḍarūrīyah* adalah sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. *Hājjiyah* ialah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup. *Taḥsiniyah* berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan peri kehidupan manusia menurut jalan yang paling baik. Menurutnnya, yang terpenting dari tiga tujuan pokok itu adalah *ḍarūrīyah* dan ia wajib dipelihara. *Hājjiyah* boleh ditinggalkan apabila memeliharanya merusak hukum *ḍarūrī*, dan *taḥsini* boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum *ḍarūrī* dan *taḥsini*.⁴⁸ Shāṭibī menambahkan bahwa kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁹

⁴⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 258.

⁴⁵ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 106.

⁴⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 152.

⁴⁷ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*, Vol. 2 (t.t.: Dār b. Affān, 1997), 7.

⁴⁸ 'Abd Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1375 H.), 205-206.

⁴⁹ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 8.

Konsep kebutuhan tidak serta merta ditentukan oleh keinginan dan untuk kepuasan materil semata, melainkan juga ditentukan oleh konsep masalah yang tidak memberikan dorongan kepada manusia untuk mengikuti keinginannya, tetapi sebaliknya mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Dalam Islam, konsep kebutuhan membentuk pola konsumsi seorang Muslim, karena pola konsumsi yang hanya berdasarkan kepada kebutuhan semata itulah yang akan menghindarkan dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu.⁵⁰

Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan konsumsi barang dan jasa yang ada, atau memiliki perilaku konsumsi barang dan jasa secara bebas, namun di dalam kebebasannya itu harus berpijak pada etika konsumsi yang telah diatur dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, etika konsumsi Islam selalu merujuk pada dasar *halalan tayyiban* dan kesederhanaan. Kehalalan suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut. Sebagai contoh, pengharaman *kehamr* dalam arti luas, adalah upaya antisipasi yang ditimbulkan baik bagi konsumen (secara jasmani maupun rohani) maupun terhadap orang lain.⁵¹ Meskipun barang-barang yang dikonsumsi adalah barang yang halal dan bersih dalam pandangan Allah, akan tetapi konsumen Muslim tidak akan melakukan permintaan terhadap barang yang ada sebanyak-banyaknya, atau menganggap semua barang sama penting, sehingga pendapatannya habis. Perlu diingat bahwa manusia memiliki kebutuhan jangka pendek (dunia) dan juga kebutuhan jangka panjang (akhirat).⁵²

Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen, di antaranya adalah *ishraf* dan *tabdhir*, juga norma yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan *infāq*. Dalam kerangka Islam, pengeluaran dibagi menjadi dua tipe. Pengeluaran tipe pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seorang Muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga, dan pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 152.

⁵¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 172.

⁵² Ibid., 175.

mata bermotif mencari akhirat.⁵³ Prioritas konsumsi seseorang harus memiliki nilai dunia dan akhirat.⁵⁴

Menurut dimensi shari'ah, keinginan ditempatkan setelah melihat *maṣlahah*. Aktivitas ekonomi baik produksi, konsumsi dan pertukaran itu mengandung *maṣlahah* sebagaimana dibatasi dalam shari'ah yang dicapai sebagai tugas keagamaan, yang diharapkan memberikan manfaat bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat.⁵⁵ Dalam hal ini, Islam tidak hanya mengubah nilai dan kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya.⁵⁶ Oleh karena itu, diperlukan Islamisasi pada perilaku konsumsi untuk membebaskan masyarakat dari doktrin sekuler dan sifat materialistik.

Urgensi Islamisasi Teori Konsumsi

Islamisasi ilmu ekonomi merupakan salah satu upaya yang diperlukan dalam kehidupan manusia saat ini, khususnya pada masyarakat Muslim modern. Apabila melihat kehidupan masyarakat Muslim sekarang, landasan unsur-unsur keislamannya mulai memudar dan beralih kepada sistem ekonomi kapitalis yang berkembang berdasarkan pemikiran Barat sekuler. Sistem ekonomi kapitalis ini melihat segala sesuatu dengan ukuran yang materialistik. Salah satu alasan yang menjadikan teori konsumsi Barat sekuler bertentangan dengan teori konsumsi Islam adalah adanya ideologi yang menyatakan bahwa konsumsi hanya ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan materi semata.⁵⁷ Ideologi tersebut mengandung unsur sekularisme, yakni memisahkan aspek agama dan berfokus pada aspek duniawi, di mana kenikmatan dan kesenangan materi dijadikan tujuan utama dari kegiatan konsumsi.

Al-Attas mengemukakan dalam bukunya *Islam and Secularism*, bahwa tantangan dan problematika umat Islam modern yang terbesar dalam dakwah dan memajukan peradaban Islam saat ini adalah paham sekularisme yang dibawa oleh orang Barat sekuler

⁵³ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 167-168.

⁵⁴ Ibid., 173.

⁵⁵ Kahf, *Ekonomi Islam*, 156-157.

⁵⁶ Ibid., 28.

⁵⁷ Nurnasrina, "Ekonomi Islam", 222.

dengan proses sekularisasi mereka.⁵⁸ Secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya sekularisme ini sudah sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat Muslim zaman sekarang, dari pemikiran atau cara berpikir, pola hidup, maupun sampai ke tingkat konsumsi dan produksi masyarakat secara keseluruhan. Terutama bagi para masyarakat Muslim yang minim pengetahuan dan pemahaman mereka tentang Islam secara global, bahkan *worldview* mereka dan pemikiran mereka terhadap nilai-nilai Islam pun kurang, sehingga mereka tidak menyadari pengaruh negatif yang dihasilkan dari sekularisme dan sekularisasi tersebut.⁵⁹

Teori konsumsi konvensional yang berkembang sekarang ini di dalamnya terdapat teori *homo economicus* yang memandang bahwa uang adalah segalanya dalam mewujudkan kepuasan, dan teori *utilitarianism* yang fokusnya pada kekuatan *maximum individual* dalam mewujudkan kepuasan tersebut. Sebenarnya dualitas dalam sistem ekonomi kapitalis inilah yang memprakarsai timbulnya perilaku konsumsi negatif masyarakat, yaitu munculnya sifat egoisme dan materialisme pada diri individu masyarakat.⁶⁰

Teori konsumsi yang terus berkembang di masyarakat mengakibatkan individu hanya akan memikirkan kepuasan konsumsi sampai memenuhi kepuasan maximum mereka. Seluruh masyarakat hanya akan berfikir tentang kepuasannya masing-masing tanpa memikirkan masyarakat yang berstatus miskin, sehingga yang kaya akan semakin kaya sendiri, dan yang miskin akan semakin miskin. Jika teori konsumsi yang seperti ini tetap terus berkembang di masyarakat maka akan menimbulkan kesenjangan sosial dan tidak dapat memberantas kemiskinan dalam negara tersebut.

Berdasarkan asumsi di atas, Islamisasi ilmu ekonomi pada teori konsumsi ini sangat diperlukan untuk membebaskan masyarakat dari doktrin sekuler dan sifat materialistis yang sudah merajalela pada diri tiap individu masyarakat pada zaman sekarang. Dalam Islamisasi ini, Islam menawarkan konsep *maṣlahah* yang berkaitan dengan perilaku/teori konsumsi dan sifat *moderity* (di tengah-tengah) berdasarkan etika konsumsi dalam Islam, sehingga dengan adanya Islamisasi ilmu ekonomi pada teori konsumsi ini, dapat memberikan perubahan dan pencerahan dalam perilaku konsumsi

⁵⁸ Al-Attas, *Islam and Secularism*, 73.

⁵⁹ Ibid., 13

⁶⁰ Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 154.

masyarakat Muslim khususnya, dan dalam peningkatan perekonomian masyarakat luas pada umumnya.

Islamisasi Teori Konsumsi

Pembahasan Islamisasi teori konsumsi, penulis merujuk pada proses Islamisasi dalam konsep Islamisasi ilmu al-Attas. Menurut al-Attas, proses Islamisasi ilmu dilakukan dengan dua cara, *pertama*, mengisolir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang terbentuk oleh budaya dan peradaban Barat;⁶¹ dan *kedua*, memasukan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan.⁶²

Unsur-unsur asing dalam teori konsumsi akan diisolir dan kemudian akan dimasukkan elemen-elemen serta konsep-konsep kunci Islam ke dalam teori konsumsi. Adapun fokus penulis adalah pada konsep kebutuhan dan keinginan, konsep barang dan jasa, dan konsep perilaku konsumsi.

1. Konsep Kebutuhan dan Keinginan

Konsep kebutuhan dan keinginan yang perlu diislamisasi adalah cara pandang tentang kebutuhan dan keinginan. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dipandang memiliki nilai yang sama dengan keinginan, di mana keinginan menjadi tujuan dari rasionalitas ekonomi untuk memenuhi kepuasan maksimum yang bersifat subjektif. Cara pandang ini akan melahirkan sifat materialistik, hedonis, kapitalis dan individualis. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya persamaan pandangan terhadap kebutuhan dan keinginan, sehingga dapat berdampak pada konsumsi barang dan jasa yang berlebihan. Jika ditelaah lebih jauh, konsep kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) berasal dari tempat yang sama, yaitu naluri hasrat manusia. Namun, dalam kerangka Islami, seluruh hasrat manusia tidak bisa dijadikan sebagai *needs*. Hanya hasrat yang memiliki *maṣlahah* atau manfaat di dunia dan akhirat yang bisa dijadikan sebagai *needs*.

Proses Islamisasi, *pertama*, memisahkan cara pandang yang mengatakan bahwa keinginan dan kebutuhan adalah sama. Kedua, meletakkan keinginan setelah *maṣlahah*. Konsep kebutuhan tidak serta merta ditentukan oleh keinginan dan untuk kepuasan materiil

⁶¹ Al-Attas, *Islam and Secularism*, 155.

⁶² Al-Attas, *Prolegomena*, 144.

semata, melainkan juga ditentukan oleh konsep *maṣlahah*.⁶³ Menurut Shāṭibī, *maṣlahah* adalah pemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat di dunia ini. *Maṣlahah* dibedakan menjadi tiga, yaitu kebutuhan pokok (*darūriyah*), pelengkap (*hājjiyah*), dan perbaikan (*taḥsinīyah*). Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaṣlahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Dengan demikian, konsep kebutuhan adalah konsep yang bebas nilai, sedangkan konsep keinginan adalah konsep yang tidak bebas nilai. Dalam hal ini, Islam tidak memberikan dorongan kepada manusia untuk mengikuti keinginannya, tetapi sebaliknya mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang didefinisikan dalam shari'ah.⁶⁴ Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki *maṣlahah* akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.⁶⁵

2. Konsep Barang dan Jasa

Konsep barang atau jasa dalam konsumsi menurut konsep ekonomi konvensional adalah segala sesuatu yang mempunyai *utility* yang dapat memberikan tingkat kepuasan kepada seseorang. Sementara konsep utilitas yang dimaksud adalah jika sesuatu tersebut dapat memberikan tingkat kepuasan maka dinamakan barang konsumsi. Pandangan *utility* ini sangat bersifat subyektif bagi masing-masing individu, dalam artian sesuatu yang dianggap memberikan nilai guna berupa pemenuhan rasa puas atas konsumsinya belum tentu akan memberi rasa puas pada individu yang lain.⁶⁶

Cara Islamisasi konsep barang dan jasa adalah, *pertama*, mengganti konsep *utility* dengan *maṣlahah*. *Kedua*, dengan membatasi konsep barang dan jasa yang akan dikonsumsi melalui konsep *ḥalāl* dan *ḥalāl*. Konsep Barang konsumsi dalam teori ekonomi konvensional jelas tidak dibatasi, sebagaimana dalam pernyataan 'segala sesuatu' di atas. 'Segala sesuatu' ini bisa menjadi apapun asal dapat memenuhi kepuasan seseorang entah itu baik atau buruk. Namun, dalam Islam konsep barang dan jasa dibatasi

⁶³ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqat*, 7.

⁶⁴ Amalia, *Sejarah Pemikiran*, 258.

⁶⁵ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 152.

⁶⁶ Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi*, 146-147.

dalam istilah *ḥalāl* *tayyib*. Kehalalan suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut. Sebagai contoh pengharaman *ḵhamr* yang telah disinggung di muka.⁶⁷

Perilaku memanfaatkan atau mengkonsumsi sesuatu yang baik dalam Islam dianggap sebagai kebaikan, karena kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya. Oleh karena itu, mukmin semestinya berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah Allah dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang diciptakan Allah untuk manusia. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak.⁶⁸ Namun demikian, Islam tetap menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan.

3. Konsep Kepuasan Konsumsi

Menurut konsep konvensional, keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Teori ekonomi konvensional menjabarkan utilitas seperti memiliki barang/jasa untuk memuaskan keinginan manusia.⁶⁹ Dengan demikian, tujuan terakhir dari konsumsi tersebut adalah mencapai kepuasan maksimum.⁷⁰ Perilaku konsumsi saat ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, namun juga untuk kepentingan kesenangan dan *prestige* (harga diri). Dampak negatif yang timbul dalam masyarakat adalah munculnya sifat materialistis dan egoisme dengan mementingkan kepentingan pribadi serta acuh tak acuh terhadap realitas sosial.

Selain itu, yang menjadi permasalahan di sini adalah prioritas konsumsi yang lebih condong pada kepuasan materil. Dalam asumsi konvensional, kepuasan dinilai tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Terlebih lagi, ideologi kapitalisme ini secara praktis mengarah pada individu untuk mengejar tujuan yang tidak jelas. Dikatakan tidak jelas karena keinginan itu sendiri merupakan sesuatu yang samar-samar (tidak jelas).

Cara Islamisasi konsep kepuasan konsumen adalah, *pertama*, dengan tidak menjadikan kepuasan sebagai prioritas utama dalam konsumsi. *Kedua*, menggunakan konsep *maṣlaḥah* sebagai landasan

⁶⁷ Ibid., 172.

⁶⁸ Khaf, *Ekonomi Islam*, 27-28.

⁶⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 152.

⁷⁰ Setyowati et al., *Ekonomi Mikro*, 89.

dasar dalam konsumsi. Selain itu, terdapat asumsi yang perlu diluruskan yaitu asumsi konvensional tentang “kepuasan konsumen yang tidak terbatas, tapi sumber daya alam terbatas”, padahal pada hakikatnya sumber daya alam tidaklah terbatas, melainkan akan selalu ada karena Allah akan menjamin semua rezeki atau kebutuhan hidup tiap makhluk-Nya.⁷¹

Seperti halnya Islamisasi konsep keinginan dan kebutuhan melalui konsep *maṣlaḥah*, kepuasan konsumen juga menggunakan konsep *maṣlaḥah*, dengan meletakkan kepuasan setelah *maṣlaḥah* yakni dengan melakukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan *darūriyyah*, *ḥajjiyyah*, dan *taḥsinīyyah*. Kepuasan konsumen cenderung pada sifat berlebih-lebihan, dan konsumsi yang berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *ishrāf* (pemborosan) atau *tabdhīr* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna).⁷² Islam menyarankan agar manusia berada di posisi tengah-tengah (*moderity*) dan dalam kesederhanaan (*simplicity*). Kesederhanaan dalam konsumsi memiliki arti jalan tengah di antara dua cara hidup yang ekstrim antara paham materialistis dan *zuḥd*. Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen, selain masalah *ishrāf* dan *tabdhīr*, adalah juga norma yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan *infāq*.⁷³ Selain itu, prioritas konsumsi seseorang harus memiliki nilai dunia dan akhirat.⁷⁴

Penutup

Islamisasi ilmu ekonomi pada teori konsumsi sangat diperlukan untuk membebaskan masyarakat dari doktrin sekuler dan sifat materialistis yang sudah merajalela pada diri tiap individu masyarakat terutama Muslim saat ini. Dalam Islamisasi ini, Islam menawarkan konsep *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan perilaku/teori konsumsi dan sifat *moderity* (di tengah-tengah), berdasarkan etika konsumsi dalam Islam.

Ada dua proses Islamisasi menurut al-Attas, yaitu: *Pertama*, mengisolir unsur-unsur kunci yang terbentuk dari budaya dan peradaban Barat. *Kedua*, memasukkan elemen-elemen kunci Islam ke dalam badan ilmu pengetahuan. Islamisasi konsep keinginan

⁷¹ Beik, “Islamisasi Ilmu Ekonomi”, 188.

⁷² Ibid., 28.

⁷³ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 167-168

⁷⁴ Ibid., 173.

dan kebutuhan dilakukan dengan membebaskan *worldview* masyarakat yang mengatakan bahwa keinginan memiliki nilai yang sama dengan kebutuhan, yakni dengan memasukkan konsep *maṣlahah* sebagai dasar utama dari keinginan dan kebutuhan konsumsi. Adapun Islamisasi konsep barang dan jasa adalah dengan membatasi konsep tersebut dengan konsep *ḥalalan ṭayyiban*. Sedangkan Islamisasi konsep kepuasan konsumsi adalah dengan membebaskan cara pandang masyarakat terhadap kepuasan konsumsi dengan tidak menjadikan kepuasan sebagai prioritas utama dalam konsumsi, lalu memasukkan unsur *maṣlahah* sebagai landasan utama dalam konsumsi, bukan kepuasan.

Daftar Rujukan

- Attas (al), Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1978.
- . *Prolegomena*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1995.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Islami*. Yogyakarta: EKONESIA, 2003.
- Beik, Irfan Syauqi. "Islamisasi Ilmu Ekonomi", *Islamiconomic*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Darrās, Muḥammad ‘Abd Allāh. *al-Dīn*, Edisi Kedua. Kuwait: Dār al-Qalam, 1970.
- Daud, Wan Mohd. Nor Wan. *The Beacon on the Crest of a Hill: A Brief History and Philosophy of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*. Kuala Lumpur: ISTAC Malaysia, 1991.
- Faruqi (al), Isma’il Raji. *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon, U.S.A: International Institute of Islamic Thought, 1982.
- . *Al-Tanbīh: Its Implications for Thought and Life*. Herndon, Virginia, U.S.A: International Institute of Islamic Thought, 1992.
- . *Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Pustaka, 1995.
- Haneef, Muhammad Aslam. *A Critical Survey of Islamization of Knowledge*. Malaysia: IIUM, 2005.

- Hassan, Zubair. "Islamization of Knowledge: Issue And Agenda", *IIUM Journal of Economics and Management*, Vol. 6, No. 2, 1998.
- Hoetoro, Arief. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejaraban dan Metodologi*. Malang: BPFE, 2007.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kayed, Rasem N. "Islamic Entrepreneurship: A Case Study of Saudi Arabia", *World Scientific Jurnal of Development Entrepreneurship*, Vol. 15, No. 4, 2010.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1375 H.
- Masykuroh, Ely. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Islam*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Muhaimin. *Konsep Pendidikan Islam: Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum*. Solo: Ramadhani, t.th.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Muslih, Kholid et al. *Worldview Islam*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018.
- Nurnasrina. "Ekonomi Islam Sarana Dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Madani", *Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, November 2013.
- Ragab, Ibrahim A. "On The Nature and Scope of the Islamization Process: Towards Conceptual Clarification", *Intellectual Discourse: Internation Islamic University Malaysia*, Vol. 3, No. 2, 1995.
- Rosana, Elly. "Modernisasi dan Perubahan Sosial", *Jurnal Tapis*, Vol. 7, No. 12, 2011.
- Safi, Louay M. *The Foundation of Knowledge: A comparative Study in Islamic and Western Method of Inquiry*. Malaysia: IIUM Press, 1996.
- Samuelson, Paul A. et al. *Economic*. New York: McGraw-Hill, 2010.
- Shāṭibī (al). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Vol. 2. t.t.: Dār b. ‘Affān, 1997.
- Setyowati, Endang et al. *Ekonomi Mikro Pengantar*. Yogyakarta: FTIE YKPN, 2003.
- Sharifi, Hadi. "Review of Islamization of Knowledge by Ismail Raji al-Faruqi", *Muslim Education Quarterly*, Vol. 1, No. 3, 1984.

- Sudarsih, Sri. *Konsep Hedonisme Epikuros dan Situasi Indonesia Masa Kini*. Semarang: UNDIP, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Konsep ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Utama, Dayno. "Islamisasi Prinsip Counter Accounting", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 2, 2017.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribners' Sons, 1958.
- Zarqa, Muhammad Anaz. "Islamization of Economic: The Concept and Methodology", *Journal of King Abadulaziz University Islamic Economics*, Vol. 16, No. 1, 2003.